

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Sistem Informasi

2.1.1.1 Pengertian Kualitas

Pada dasarnya setiap organisasi dihadapkan pada sebuah keputusan. Keputusan dapat diambil dari informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Jika *good governance* ingin tercipta dengan baik, maka pemerintah daerah harus memikirkan sebuah sistem informasi yang memiliki nilai tambah (*value added*) dalam mengatasi kompleksitas-kompleksitas pada lingkungan pemerintahan. Supaya sistem informasi yang terbentuk dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis maka sistem informasi harus diimbangi dengan kemajuan teknologi informasi.

Definisi kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga definisi kualitas akan dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya.

Menurut Tjiptono (2012:152) definisi kualitas yaitu:

“Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

Kualitas dikemukakan oleh Goetsch & Davis dalam Hessel Nogi S Tangkilisan (2007:209), sebagai berikut:

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”

Menurut Iman Mulyana (2010:9) yang dikutip oleh Susilawati (2014) mengemukakan bahwa:

“Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”.

Menurut Garvin yang dikutip oleh Tjiptono (2012:143) bahwa:

“Terdapat lima perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas dilihat tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi”.

Berdasarkan definisi diatas, maka kualitas merupakan standar yang digunakan dalam konteks kemampuan, kinerja, keandalan, dan kemudahan pemeliharaan yang dapat memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas dilihat tergantung oleh para konsumen, jika produk yang ditawarkan memuaskan konsumen dapat dikatakan produk tersebut berkualitas.

2.1.1.2 Dimensi Kualitas

Menurut Davin Garvin yang dikutip McLeod (2007) memperkenalkan subyek kualitas yang diterapkan pada produk sistem informasi dan telah mengidentifikasi delapan dimensi yang berbeda, terdiri dari:

1. Kinerja
2. Keistimewaan
3. Keandalan
4. Kesesuaian
5. Daya Tahan
6. Kemudahan Perbaikan
7. Keindahan
8. Persepsi terhadap Kualitas

Dimensi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja

Dimensi ini mengenai seberapa baik suatu sistem informasi melakukan apa yang memang harus dilakukannya.

2. Keistimewaan

Dimensi kualitas ini berkaitan dengan kemampuan sistem informasi untuk bertahan selama penggunaan yang biasa.

3. Keandalan

Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan sistem informasi untuk bertahan selama penggunaan yang biasa.

4. Kesesuaian

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa baik sistem informasi tersebut sesuai dengan standar. Bagi pelanggan industry, yaitu perusahaan/instansi yang membeli dari perusahaan/instansi lain. Standar tersebut biasanya dinyatakan dalam istilah kuantitatif yang ketat.

5. Daya Tahan

Daya tahan (durability) adalah ukuran umur ekonomis sistem informasi dan teknologi modern memungkinkan hal ini. Sementara banyak produk sistem informasi yang berjenis sekali pakai. Ini berarti sistem informasi

yang ada tersebut sama sekali tidak akan terpakai jika terjadi pengembangan sistem.

6. Kemudahan Perbaikan

Sistem informasi yang digunakan untuk jangka waktu lama sering harus diperbaiki atau dipelihara. Rancangan sistem informasi yang memudahkan perbaikan akan menambah nilai produk.

7. Keindahan

Kualitas tidak selalu bergantung pada kemampuan fungsional. Keindahan (*aesthetics*), suatu sistem informasi terletak bagaimana produk tersebut dilihat dan dirasakan, dapat menjadi dimensi yang penting.

8. Persepsi terhadap Kualitas

Dimensi ini tidak didasarkan pada sistem informasi itu sendiri tetapi pada citra atau reputasinya. Iklan, peringkat dari pakar, pendapat teman dan keluarga dapat mempengaruhi persepsi pemakai terhadap produk sistem informasi.

2.1.1.3 Pengertian Sistem informasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan membutuhkan berbagai informasi untuk menjalankan kegiatannya dengan efektif dan efisien. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, untuk menghasilkan sistem informasi yang berkualitas maka dibuatlah sistem informasi. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat menyidiakan informasi untuk

pengambilan keputusan saat ini dan masa depan serta untuk mendukung strategi bersaing perusahaan.

Menurut Azhar Susanto (2013:52) definisi sistem informasi adalah sebagai berikut:

“Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub sistm baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna”.

Definisi sistem informasi menurut Joseph Wilkinson dalam bukunya *Accounting and Information System* yang dikutip oleh Agus Mulyanto (2009:28) adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumberdaya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan”.

Menurut O’Brian yang dikutip oleh Yakub (2012:17) definisi sistem informasi adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi (*information system*) merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi”.

Sedangkan menurut Jogiyanto yang dikutip oleh Yakub (2012:17) definisi sistem informasi adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”.

Berdasarkan beberapa pengertian sistem informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan orang yang menggunakan teknologi itu dalam melakukan aktivitasnya untuk mendukung operasional perusahaan dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Dengan sistem informasi membantu perusahaan dapat menjalankan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien.

2.1.1.4 Komponen Sistem Informasi

Komponen-komponen sistem informasi yang terintegrasi berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari perusahaan, juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manajemen.

Menurut Azhra Susanto (2013:58) komponen sistem informasi dengan terdiri dari:

1. Perangkat keras (*Hardware*)
2. Perangkat lunak (*Software*)
3. Manusia (*Brainware*)
4. Prosedur (*Procedur*)
5. Basis data (*Database*)
6. Jaringan komunikasi (*Communication network*)

Komponen-komponen Sistem Informasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*Hardware*)

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Perlu diketahui bahwa

hardware tidak menentukan tapi membantu jalannya sistem informasi akuntansi. Bagian–bagian hardware terdiri atas:

a. Bagian Input (*Input device*)

Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukan data kedalam komputer seperti, *keyboard, mouse, scanner,* dll. Alat-alat ini umumnya baru bisa bekerja jika ada *driver (hardware dan software)* yang bentuknya terpisah atau *builtin* dalam *motherboard*

b. Bagian Pengolahan Utama dan Memori

CPU (*Central Prossesing Unit*) yang selama ini mungkin kita kenal adalah merupakan rumah atau (*box*) dari komponen-komponen lainnya, seperti:

- 1) *Processor* (Otak computer)
- 2) *Memory*
- 3) *Motherboard*
- 4) *Hardisk*
- 5) *Floppy disk*
- 6) *CD ROM*
- 7) *Expansion slot*
- 8) *Devices controller (Multi I/O, VGA card, Sound card)*
- 9) *Komponen lainnya (fan, baterai, conector, dll)*
- 10) *Power Supply*

c. Bagian Output (*Output Device*)

Peralatan Output merupakan peralatan – peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Beberapa macam peralatan output yang sering digunakan seperti :*printer*, layar monitor, *speaker LCD*, dll.

d. Bagian Komunikasi

Peralatan komunikasi adalah peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Seperti, *Network card* untuk LAN, *wireless LAN*, dan lain-lain.

2. Perangkat lunak (*Software*)

Software merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Tanpa adanya *software* komputer tidak dapat menjalankan fungsinya. Bagi sebagian orang *software-software* tersebut jelas fungsinya, tapi bagi sebagian yang lainnya terutama bagi mereka yang baru mendalami masalah komputer, keberadaan *software-software* tersebut cukup membingungkan. Hal penting yang perlu di ingat adalah *software* bukan merupakan sistem informasi, *software* hanya merupakan unsur dari sistem informasi akuntansi.

Pengelompokan *software* meliputi :

a. *Operating system* (sistem operasi)

Berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam Komputer. Misalnya antara *keyboard* dengan CPU, Layar monitor, dan lain-lain. Contohnya: Microsoft Windows, Linux, dll. Sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia saat

ini adalah sistem operasi yang dibuat oleh *Microsoft* dengan namamicrosoft windows.

b. *Interpreter dan compiler*

1) *Interpreter* merupakan *software* yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti manusia kedalam bahasa komputer atau bahasa mesin perintah per perintah. Contoh: *Microsoft access, Oracle, Pascal*, dll.

2) *Compiler* (komplier) untuk menterjemahkan bahasa manusia kedalam bahasa komputer secara langsung satu *file*.

c. Perangkat lunak aplikasi

Perangkat lunak aplikasi atau sering juga disebut ‘paket aplikasi’ merupakan *software* jadi yang siap untuk digunakan. *Software* ini dibuat perusahaan perangkat lunak tertentu (*Software House*) baik dari dalam maupun luar negeri yang umumnya berada di Amerika Serikat. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum karena itu sangatlah wajar jika *software-software* ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer.

3. Manusia (*Brainware*)

Sejalan dengan persepsi kita bahwa *brainware* Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi dalam dunia bisnis yang selama ini dikenal sebagai SIA. *Brainware* dikelompokan sebagai berikut:

a. Pemilik sistem informasi

Pemilik sistem informasi merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Mereka biasanya disamping bertanggung jawab terhadap biaya dan waktu yang digunakan untuk pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi, mereka juga berperan sebagai pihak penentu dalam menentukan diterima atau tidaknya sistem informasi.

b. Pemakai sistem informasi

Para pemakai akhir sistem informasi biasanya kurang begitu perhatian dengan biaya yang dikeluarkan serta manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan pemilik sistem informasi. Perhatian utama dari pemakai akhir sistem informasi tersebut adalah bagaimana agar sistem informasi dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Mereka biasanya menaruh perhatian terhadap kebutuhan bisnis apa yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Pemakai akhir sistem informasi juga sangat memperhatikan masalah teknologi yang digunakan.

4. Prosedur (*Procedure*)

a. Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur merupakan komponen dari sistem informasi akuntansi yang sering dilupakan, padahal tanpa prosedur yang benar, sistem informasi sehebat apapun akan menghadapi resiko tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Prosedur penting dimiliki suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

b. Aktivitas

Pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut, karena itu aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk mendukung tujuan organisasi, sedangkan aktivitas sistem informasi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung jalannya bisnis perusahaan agar berjalan dengan baik.

c. Fungsi

Fungsi merupakan kumpulan aktivitas yang mendukung operasi bisnis suatu organisasi. Mereka biasanya meliputi beberapa aktivitas berbeda yang saling membantu untuk hal-hal yang sifatnya lebih umum.

5. Basis Data (*Database*)

Sistem *database* merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan.

a. Media dan Sistem penyimpanan data

Media dan sistem penyimpanan data terdiri dari dua :

- 1) Media penyimpanan data berurutan – melalui media ini *record-record* data akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat

penyimpanan. Sebagai contoh adalah pita magnetic (*magnetic tape*).

- 2) Media penyimpanan secara langsung – memungkinkan pemakai (*user*) membaca data dalam urutan yang dibutuhkan tanpa perlu memperhatikan urutan penyusunan secara *physic* dari media penyimpanan data tersebut.

b. Sistem Pengolahan

Ada dua cara pengolahan data yaitu :

- 1) Pengolahan secara *Batch* (mengumpulkan terlebih dahulu)
- 2) Pengolahan secara *On-line*

c. Organisasi *Database*

- 1) Organisasi data pada *database* tradisional

Memiliki tujuan agar sistem informasi secara efektif memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap. Tapi ada beberapa kelemahan dalam sistem ini seperti:

- a) Data rangkap dan tidak konsisten
- b) Kesulitan mengakses data
- c) Data terisolasi
- d) Data sulit diakses secara bersamaan
- e) Masalah keamanan data
- f) Masalah integritas

2) Organisasi *database* modern

Memberikan banyak keuntungan bagi implementasi Sistem Informasi Akuntansi.

d. Model-Model Data.

Secara umum model data terbagi dalam beberapa model yaitu :

1) Model hierarki – model data yang menggambarkan hubungan antara data berdasarkan tingkatnya.

2) Model *network* – model data yang menggambarkan hubungan antara data berdasarkan kepentingannya.

3) Model relasi – model data yang disusun berdasarkan pada hubungan antar dua entitas/organisasi.

6. Jaringan komunikasi (*Communication network*)

a. Perkembangan teknologi jaringan komunikasi

1) Penggabungan computer dan komunikasi

2) Jaringan informasi *superhighway*

b. Komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi

c. Topologi jaringan telekomunikasi

Ada empat topologi jaringan yang digunakan yaitu:

1) *Star network*

2) *Bus network*

3) *Ring network*

4) *Hibryd network*

d. Jaringan berdasarkan Geografi

1) LAN (*Local Area Network*)

Merupakan jaringan yang ada pada lokasi tertentu misalnya suatu ruang atau suatu gedung.

2) WAN (*Wide Area Network*)

Merupakan jaringan yang tersebar ke beberapa lokasi. Atau bisa juga di bilang WAN adalah kumpulan dari beberapa LAN yang terhubung secara *On-line* melalui internet.

e. Penggunaan Telekomunikasi

1) Surat elektronik (*elektronik mail*)

2) Surat suara (*voice mail*)

3) Mesin fax

4) Layanan informasi digital

5) *Teleconferencing, data conferencing* dan *video converencing*

6) Perpindahan data secara elektronik

7) Perangkat untuk kerja berkelompok (*groupware*)

2.1.1.5 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi

Tujuan sistem informasi menurut Romney dan Steinbart (2011) adalah sebagai berikut:

1. Mendukung operasi-operasi sehari-hari.
2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen.
3. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban.

Fungsi sistem informasi adalah sebuah sistem yang berisikan tentang informasi mengenai organisasi dan lingkungan sekitarnya. Aktivitas dasar yang

ada dalam sistem informasi adalah input, proses, dan output mengerjakan informasi yang dibutuhkan organisasi. Umpan baliknya adalah output yang dikembalikan kepada orang-orang didalam organisasi untuk mengevaluasi dan menyaring data input.

2.1.1.6 Pengertian Kualitas Sistem Informasi

Kualitas sistem informasi menfokuskan pada kinerja komponen sistem informasi yaitu seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, basis data, jaringan komunikasi, data, aktivitas, jaringan dan teknologi dari sistem informasi dalam menghasilkan informasi untuk para pengguna.

Menurut Venia Agustines Tananjaya (2012) definisi kualitas sistem informasi adalah sebagai berikut:

“Kualitas sistem informasi merupakan kualitas suatu produk atau pelayanan yang pada umumnya diukur berdasarkan kecocokan pemakai dengan sistem informasi tersebut, dimana sistem informasi mampu diaplikasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemakai”.

Menurut DeLone dan McLean yang dikutip oleh Istianingsih dan Wiwik Utami (2009) definisi kualitas sistem informasi adalah sebagai berikut:

“Kualitas sistem informasi merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri”.

Kualitas Sistem Informasi juga di definisikan oleh Davis et al., dan juga Chin dan Todd yang dikutip oleh Istianingsih dan Wiwik Utami (2008) sebagai berikut:

“Kualitas sistem informasi didefinisikan sebagai *perceived ease of use* yang merupakan seberapa besar teknologi komputer dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan digunakan”.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi adalah kualitas dari informasi yang dihasilkan apakah telah memiliki karakteristik informasi yang baik dan berguna bagi para pemakai informasi. Sistem informasi yang berkualitas dapat digunakan sesuai dengan keinginan para pengguna dan dapat menghasilkan suatu informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap.

2.1.1.7 Dimensi Kualitas Sistem Informasi

Mengukur kualitas dari suatu sistem informasi bukanlah suatu hal yang mudah, hal ini disebabkan tidak adanya kriteria yang menjadi standar dalam menentukan kualitas sistem informasi itu sendiri. Pengukuran kualitas sistem dapat dilakukan dengan melihat efektifitas suatu sistem informasi yang dijalankan di dalam perusahaan.

Pengukur-pengukur kualitas sistem informasi menurut Bailey dan Pearson yang dikutip oleh Jogiyanto (2007:14) terdiri dari:

1. Kenyamanan Akses
2. Keluwesan Sistem
3. Integritas Sistem
4. Waktu Respon

Pengukuran kualitas sistem informasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kenyamanan Akses

Kenyamanan akses, berarti sistem informasi mudah dipelajari dan mudah dipahami pada awal penggunaannya, kemudahan dalam pengoperasian sistem akan memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut, dan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. Keluwesan Sistem

Keluwesan sistem, sistem yang luwes atau fleksibel adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Karakteristik penting dalam mencapai keluwesan suatu sistem adalah bahwa sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, dan bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka sistem yang telah ditetapkan oleh perancang sistem ataupun sistem informasi dapat disesuaikan dengan proses bisnis dan kegiatan. Dengan kata lain, program yang ada dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan keperluan sehingga sistem informasi berjalan sesuai fungsinya.

3. Integritas Sistem

Integritas sistem, sistem dapat diakses tanpa menyulitkan pengguna dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, integritas sistem dapat dinilai dari kemampuan sistem dalam menemukan kesalahan.

4. Waktu Respon

Waktu respon, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespon input dan tepatnya pengolahan input untuk menghasilkan data atau informasi.

Kualitas sistem informasi menjadi hal penting untuk diukur untuk mengetahui kepuasan pengguna sistem informasi. Pengguna sistem informasi akuntansi akan menggunakan sistem informasi dan merasa puas apabila sistem tersebut mempercepat dan memudahkan pekerjaan, fleksibel dengan kebutuhan pengguna, mudah diakses dan dapat menghasilkan informasi dengan cepat.

2.1.1.8 Pengukuran Kualitas Sistem Informasi

Menurut Istianingsih (2008) Kualitas Sistem Informasi terdiri dari :

1. Kualitas Pelayanan
2. Kualitas Sistem
3. Kualitas Informasi

Adapun penjelasan dari poin-poin diatas adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan

- a. *Reliability* (Kehandalan), yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan segera, dan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
- b. *Responsiveness* (Daya Tanggap), yaitu suatu kemauan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan menyampaikan informasi yang jelas.

- c. *Assurance* (jaminan), yaitu pengetahuan yang luas, kesopanan dari karyawan dan untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan.
 - d. *Empathy* (Empati), yaitu suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan yang spesifik serta memiliki waktu yang nyaman bagi pelanggan.
2. Kualitas Sistem Informasi
- a. *System Sexability* (Kemudahan untuk diakses), yaitu untuk memberikan kemudahan untuk menampilkan kembali data-data yang diperlukan dan menampilkannya dalam format yang berbeda.
 - b. *Ekspense Time* (Kecepatan Akses), kecepatan pemrosesan dan waktu respon.
 - c. *Security* (Keamanan), yaitu keamanan sistem dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi.
3. Kualitas Informasi
- a. *Content* (Isi), yaitu kemampuan sistem dalam menyediakan laporan yang informatif sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, menghasilkan laporan yang cepat, dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - b. *Accuracy* (Akurat) yaitu kemampuan sistem informasi akuntansi yang dihasilkan keakutan informasi.

- c. *Format* (Format) yaitu sisi tampilan sistem informasi akuntansi mudah ketika digunakan.
- d. *Easy of Use* (Kemudahan Pemakai) yaitu suatu sistem informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut.
- e. *Timelines* (Ketepatan Waktu) yaitu informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi memiliki tepat waktu.

2.1.2 Pengawasan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan berkaitan erat dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pencapaian keberhasilan suatu visi dan misi membutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal, baik dalam segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin baik tingkat pengawasan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik pula.

Saydam yang dikutip oleh Kadarisman (2012:187) menjelaskan sebagai berikut:

“Pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan karyawan. Para karyawan yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan yang tidak memperoleh bimbingan”

Menurut Halim dan Iqbal (2012:37) definisi pengawasan keuangan adalah sebagai berikut:

“Pengawasan keuangan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011:

“Pengawasan Keuangan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien”.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pengawasan Keuangan

Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan, seperti yang dikutip Riawan Tjandra (2013:133) yaitu mengklasifikasikan pengawasan seperti berikut ini:

- a. Pengendalian dipandang dari sudut pandang kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol pengawasan yaitu:
 1. Kontrol Intern yakni pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan sebagai contoh yaitu pejabat atasan yang mengontrol kinerja bawahannya secara hierarkis.
 2. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga

tidak memiliki struktural didalamnya. Contohnya adalah pengawasan keuangan yang dilakukan oleh badan independen, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, media massa dan kelompok masyarakat yang berminat dalam bidang tertentu, baik kontrol politis yang dilakukan oleh MPR dan DPR(D) terhadap pemerintah eksekutif dan juga kontrol reaktif yang dilakukan oleh badan peradilan

- b. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan yaitu:
 - 1. Pengawasan a-priori yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum disahkannya suatu keputusan atau ketetapan atas tindakan pemerintah pengawasan ini terjadi dalam proses pembahasan dimana pengawasan ini juga dapat disebut sebagai pengawasan yang mengandung unsure preventifnya artinya pengawasan ini mencegah sebelum terjadinya kekeliruan.
 - 2. Pengawasan a-posteriori yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah atau juga disebutkan sebagai pengawasan represif yang artinya pengawasan dalam hal penanggulangan setelah terjadinya tindakan pemerintah yang telah dianggap merugikan negara.
- c. Pengawasan yang dilakukan dari aspek yang diawasi yaitu:
 - 1. Pengawasan dari segi hukum yaitu pengawasan yang menilai dari aspek- aspek hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk

menjalankan pemerintahannya. Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum sehingga dalam melakukan setiap kegiatan harus jelas landasan hukumnya.

Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu melihat aspek dimana suatu tindakan ataupun keputusan pemerintah sudah tepat atau belum terhadap kemanfaatan bagi rakyat karena salah tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat dan yang menjalankan negara adalah pemerintah

2.1.2.3 Karakteristik Pengawasan Keuangan

Siswanto (2009:149) mengemukakan secara umum terdapat sembilan karakteristik pengawasan yang efektif, yaitu:

1. Akurat (*Accurate*)
2. Tepat Waktu (*Timely*)
3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)
4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on Strategic control points*)
5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)
6. Secara Organisasi Realistis (*Organizationally realistic*)
7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with organization's work flow*)
8. Fleksibel (*Flexible*)
9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)
10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organitation members*)

Adapun penjelasan dari karakteristik-karakteristik pengendalian keuangan diatas adalah sebagai berikut:

1. Akurat (*Accurate*)

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang

akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.

2. Tepat Waktu (*Timely*)

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.

3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehensible*)

Informasi dalam suatu pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif sistem pengendalian, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merespon informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustrasi diantara para karyawan.

4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Fokus on strategic control points*)

Sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk

meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

6. Secara organisasi realistik (*Organizationally realistic*)

Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistik. Perbedaan status di antara individu harus dihargai juga.

7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's work flow*)

Informasi pengendalian perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengendalian harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.

8. Fleksibel (*Flexible*)

Sistem pengendalian yang efektif harus dapat mengikuti perkembangan yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)

Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*)

Agar sistem pengendalian dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengendalian tersebut harus berhubungan dengan tujuan dan prinsip yang berarti sehingga dapat diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan. Dengan diterimanya sistem pengendalian, maka setiap anggota akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap usaha mencapai tujuan.

2.1.2.4 Prinsip Pengawasan Keuangan

Menurut Koontz dan Cyril O'Donnel yang dikutip oleh Sukarna (2011:112). Menetapkan atas prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut :

1. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*)
2. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*)
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbillity*)
4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)
5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*)
6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)
7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizationalsuitability*)
8. Prinsip azas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*)
9. Prinsip Standar (*Principle of standar*)
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*)
11. Prinsip Kekecualian (*The expection Principle*)
12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*)
13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*)

14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*)

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Prinsip Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*).
Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan(koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau devisiasi perencanaan.
2. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*).
Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari devisiasi-devisiasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan.
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbillity*).
Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila mananjer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*).
Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*). Tekhmik control yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.
6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*). Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.

7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizational suitability*). Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan susunan organisasi.
8. Prinsip azas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*). Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer Teknik control harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup organisasi yang dibutuhkan ini beda satu sama lain, tergantung pada dan tingkat tugas manajer.
9. Prinsip Standar (*Principle of standar*). Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*). Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. Prinsip Kekecualian (*The exception Principle*). Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang dihadapkan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi kedalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.

12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*). Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*). Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan Directing.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2015), Pengertian Akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala”.

Akuntabilitasmenurut Indra Bastian (2010:385) mendefinisikan sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif atau organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Adapula penjelasan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau *Government Accounting Standards Committee (GASC, 2010)* dalam kerangka kerja konseptual GAS, definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

"Accountability is the accountability of resource management and policy implementation is entrusted to the reporting entity in achieving the goals set periodically".

Menurut Adisasmita(2011:89) definisi akuntabilitas:

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Menurut Halim (2012:20) Akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu:

“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan merupakan proses pengolahan keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban yang harus disampaikan dan di pertanggungjawabkan atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif, organisasi kepada pihak yang memiliki hak, berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.1.3.2 Jenis-jenis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi (2015:9) yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)
2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*).

Adapun penjelasan dari dua macam akuntabilitas publik diatas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.

Ihyaul Ulum (2010:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan
2. Akuntabilitas Kinerja

Berikut penjelasan dua jenis akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai :

a. Integritas Keuangan

Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan. Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan secara jujur.

b. Pengungkapan

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntabilitas Kinerja, Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menggambarkan adanya kemauan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang dapat diciptakan pemerintah agar lebih baik lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *sense of accountability* dan mempertanggungjawabkan keberhasilan keberhasilan maupun

kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas pemberian amanah kepada pejabat pemerintahan.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

1. Akuntabilitas Keuangan
2. Akuntabilitas Kinerja

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41), Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Keuangan
2. Pengungkapan
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

1. Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan

atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah.

Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penyajian secara wajar yang dimaksud diatas terdapat didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyatakan "Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas".

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

2. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

Pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, mengatakan:

”Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan”.

3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- b. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- c. Undang-undang APBN,

- d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah
- e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- f. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD.
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.
- h. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Kinerja

PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

Tujuan peraturan perundangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *sense of accountability* di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seseorang pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya.

2.1.3.4 Ciri-ciri Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Dadang Sadeli (2008:104) ciri-ciri akuntabilitas yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan.
3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal.
4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen.

Adapun penjelasan diatas mengenai ciri-ciri akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
 Dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan aktivitas pemerintah, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan
 Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan dari aspek ekonomis, efisien dan efektivitas serta pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (*output*) yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (*outcome*).
3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal

Informasi yang andal (*reliable information*) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi resiko. Reabilitas informasi yang tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netritas dalam pengungkapan.

4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen

Untuk menjamin informasi yang terdapat pada akuntabilitas keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas, adanya penilaian yang objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri-ciri dari akuntabilitas yang efektif.

2.1.3.5 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10) meliputi:

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan public
4. Transparansi
5. Pengendalian

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan

yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara *vertikal* maupun *horizontal* kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup:

a. Ketidakhematan

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

b. Ketidakefektifan

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakankebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkindicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup.

2.1.3.6 Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut (Hopwood dan Tomkins,1984; Elwood, 1993) yang dikutip oleh Mahmudi (2013:9) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial

3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

Berikut dibawah ini penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas publik :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.
2. Akuntabilitas Manajerial Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sarasannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.
5. Akuntabilitas Finansial Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.1.4 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut Mahsun (2014:25) kinerja (*performance*) dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu”.

Menurut Moehariono (2012:95) pengertian kinerja adalah;

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi perusahaan yang dituangkan melalui perencanaan strategis atau perusahaan”.

Menurut Armstrong dan Baron yang dikutip oleh Irham Fahmi (2012:2) kinerja adalah:

“Kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan organisasi atau perusahaan, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kinerja merupakan hasil atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan/pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya serta untuk mencapai tujuan perusahaan/pemerintah daerah dalam periode tertentu.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran Kinerja menurut Iyahul Ulum (2009:64), antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja financial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan manfaat sistem pengukuran kinerja menurut Iyahul Ulum (2009:65), antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.4.3 Definisi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dalam BPKP (2011), kinerja instansi pemerintah adalah:

“Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan”.

Menurut Chabib Soleh dan Suropto (2011:3) definisi kinerja instansi adalah sebagai berikut:

“Kinerja Instansi Pemerintah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Daerah.”

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2.1.4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Aparatur bertugas untuk melayani masyarakat dan berkewajiban dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk mencapai suatu kinerja. Tujuan untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan tidaklah mudah, ada beberapa tantangan yang harus dilewati.

Menurut Anwar Prabu (2011:67) faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah:

1. faktor kemampuan (*ability*)
2. faktor motivasi (*motivation*)

Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge + skill*). Artinya, pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place, the right man on the right job*).

2. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja.

Sedangkan menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007), faktor-faktor yang memengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

1. Faktor personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh tiap individu karyawan.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada karyawan.
3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, dan keeratan anggota dan tim.
4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

2.1.4.5 Dimensi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja. Dwiyanto yang dikutip oleh Sudarmanto (2014) mengemukakan bahwa terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kualitas layanan
3. Responsitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Kelima indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produktivitas

Dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.

2. Kualitas Layanan

Dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

3. Responsitas

Dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. Responsibilitas

Menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

5. Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki stakeholders.

Sedangkan menurut Bernardin yang dikutip Sudarmanto (2014:12) menyampaikan ada 6 kriteria dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja, yaitu:

- a. *Quality*
- b. *Quantity*
- c. *Timeliness*
- d. *Cost-Effectiveness*
- e. *Need for supervision*

Beberapa kriteria dasar atau dimensi untuk kinerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Quality*, terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam memenuhi maksud atau tujuan.
- b. *Quantity*, terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.
- c. *Timeliness*, terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk.
- d. *Cost-effectiveness*, terkait dengan penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau memperoleh

hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi.

- e. *Need for supervision*, terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan.
- f. *Interpersonal impact*, terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerja sama di antara sesama pekerja dan anak buah.

2.1.4.6 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja. Elemen yang terdapat dalam indikator kinerja menurut Indra Bastian (2010 :267) berupa:

1. Indikator Masukan (*Input*)
2. Indikator Proses (*Process*)
3. Indikator Keluaran (*Output*)
4. Indikator Hasil (*Outcome*)
5. Indikator Manfaat (*Benefit*).

Indikator kinerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan

meninjau distribusi sumber daya, sesuatu lembaga menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah diterapkan.

b. Indikator Proses (*Process*)

Rambu yang dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh pemanfaatan sejumlah *input*. Sedangkan ekonomis yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut secara lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang ditentukan untuk itu.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator kinerja harus dibandingkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan teratur. Jadi, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah

diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tempat, lokasi dan waktu).

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Yuli Anraini (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD Kabupaten Indragiri Hilir)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan sistem keuangandaerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. - Aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. pengelolaan keuangan daerah.
2	Nurhayati Solehah (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan (SKPD Kota/Provinsi Banten)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. - Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. - aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
3	Ida Bagus Pujiswara, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah - Pemanfaatan sistem

		Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)	informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.
4	Anies, Iqbal, Mustofa (2012)	Pengaruh penyajian dan Akseibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Kabupaten Pematang)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. - Akseibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian dan akseibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
6	Natak Riswanto (2016)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
7	Zuraidah Mohd Sanusi, Razana Juhaida Johari, Jamaliah Said, Takiah Iskandar (2015)	<i>The Effects of Internal Control System, Financial Management and Accountability (Mosques in Malaysia)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Budget participation influenced financial management practices in the mosque.</i> - <i>Accountability influenced financial management practices</i>

			<p><i>in mosque.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fund usage influenced financial management practices in mosque.</i> - <i>Internal control system influenced financial management in mosque.</i>
--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Moh.Nasir (2010:3) menyatakan bahwa kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam pemerintahan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh *Good Government Governance*. Hal ini dalam mengelola keuangan rumah tangganya sendiri, pemerintah harus mampu melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Sebuah sistem informasi akuntansi yang layak merupakan syarat utama suatu pengelolaan keuangan yang baik, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap organisasi.

Menurut (Putra, 2010) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu system yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Tuasikal, 2007 yang dikutip oleh Afrianti 2011) menyatakan bahwa dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi.

Sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai substansi usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dan transparansi melalui pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu, PP tersebut juga merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari paket reformasi regulasi keuangan negara khususnya mengenai penerapannya di pemerintahan daerah yang mencakup tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, khusus mengenai akuntansi di pemerintahan daerah sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntabilitas.

2.2.2 Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas yang baik. Pengendalian intern merupakan salah satu

mekanisme paling penting dalam menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengontrol operasi mereka.

Menurut Penelitian yang dilakukan Akhmad Syarifudin (2010) mengemukakan bahwa upaya meningkatkan fungsi pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan bebas korupsi kemasadepan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat pengawasan intern pemerintah.

Menurut Wiguna et al., (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Bawasda mampu melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing SKPD dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurut penelitian Muhammad Alqodri (2015) bahwa pengawasan memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Baswir, 1999:129) mengemukakan bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku”.

Menurut (Halim, 2007 : 330) mengemukakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.2.3 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Akuntabilitas memiliki pengaruh yang relative kuat terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan dana masyarakat.

Menurut Ismiarti (2013:90-91) menyatakan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja.

Menurut (Wiguna, 2015) menyatakan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan,

dimana akuntabilitas sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan.

Mardiasmo (2009:121) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas publik bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Menurut Mahmudi (2007:11) menjelaskan bahwa akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Landasan Teori

- Kualitas Sistem Informasi : DeLeondan McLean dalam Istianingsih dan Wiwik Utami (2009), Davis et al., Chin dan Todd dalam Istianingsih dan Wiwik Utami (2008), Eriksson dan Torn dalam Mehdi Khosrowpour (2000:1164), Venia Agustines Tananjaya (2012).
- Pengawasan Keuangan : Saydam dalam kadarisman (2012:187), Halim dan Iqbal (2012:37), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010.
- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan : Indra Bastian (2010:385), *Government Accounting Standards Committee (GASC, 2010)*, Adisasmita (2011:89), Loyd, et al., dalam A Ebrahim (2010), Halim (2012:20).
- Kinerja Instansi Pemerintah Daerah : Irham Fahmi (2012:2), Rudianto (2013:189), Moehariono (2012:95), Agustina (2013:3).

Referensi

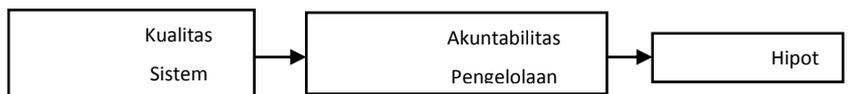
1. Dewi Yuli Angraini (2016)
2. Nurhayati Solehah (2014)
3. Ida Bagus Pujiswara, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2013)
4. Anies Iqbal Mustofa (2014)
5. Zuraidah Mohd Sanusi, Razana Juhaida Johari,

Data Penelitian

1. Penelitian pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.
2. Kuesioner dari 43 Responden.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan.

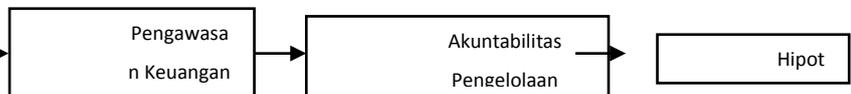
Premis 1

1. Nasir (2010:3)
2. Putra (2010)
3. Tuasikal, 2007 dalam Afrianti 2011
4. PP No.58 tahun 2005



Premis 2

1. Akhmad Syarifudin (2010)
2. Baswir (1999:129)
3. Wiguna (2015)
4. Widanarto (2009)
5. Halim (2007 : 330)
6. Muhammad Alqodri (2015)

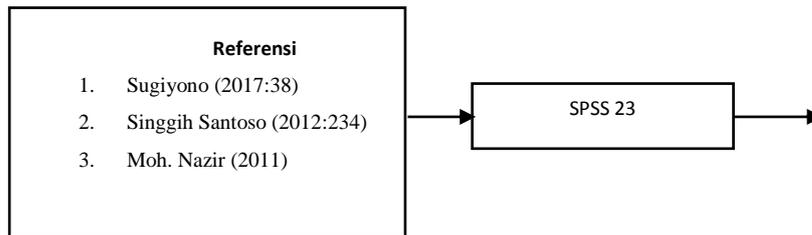


Premis 3

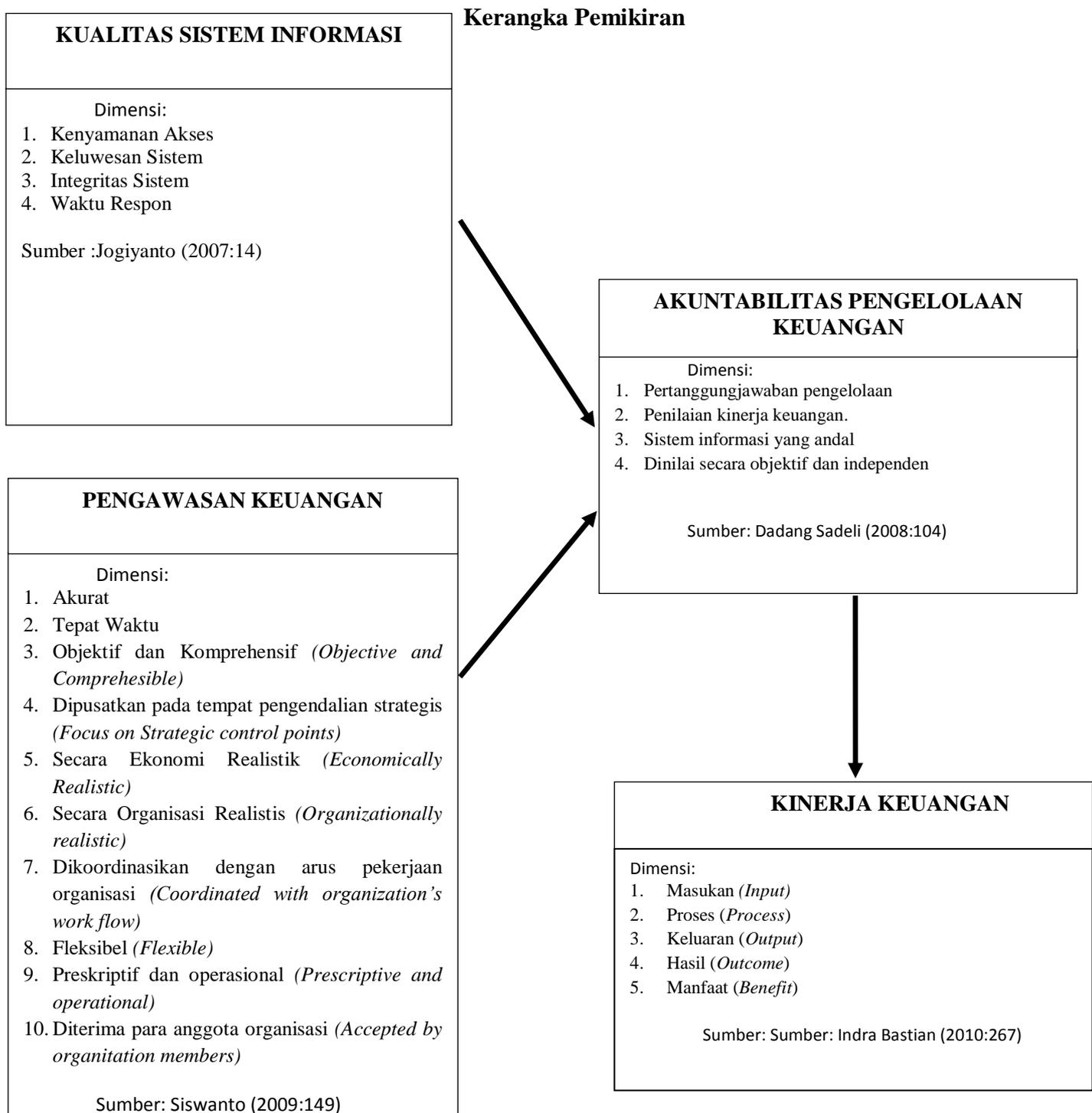
1. Ismiati (2013:90-91)
2. Wiguna (2015)
3. Mardiasmo (2009:121)
4. Mahmudi (2007:11)



1. Analisis Deskriptif
 - Mean
2. Analisis Verifikatif
 - Uji Validitas
 - Uji Reliabilitas
 - Path Analysis
 - Koefisien Determinasi



Gambar 2.1



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis adalah :

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah penulis kemukakan, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

- H1 :Terdapat pengaruh kualitas sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- H2 :Terdapat pengaruh pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- H3 :Terdapat pengaruh kualitas informasi dan pengawasan keuangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- H4 :Terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

- H5 :Terdapat pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H6 :Terdapat pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.